



Peran Kegiatan Usaha Bumdes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa

Nurinnah¹, Fakhruddin Mansyur², Saidin Mansyur³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

² Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

* nrinnah28@gmail.com

* fakhruddinmansyur@unismuh.ac.id

* saidinmansyur09@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Maret 2026

Revised 10 Maret 2026

Accepted 20 Maret 2026

Available online 17 April 2026

Kata Kunci:

Bumdes, ekonomi, Masyarakat

Keywords:

BUMDes, economy, society

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Ada berbagai jenis program yang di keluarkan oleh pemerintah selama ini untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Tengah Masyarakat, tak jarang masyarakat di berikan fasilitas yang memadai guna menunjang usaha Mereka dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini pemerintah di desa Pallantikang kecamatan pattalassang kabupaten gowa memberikan jalan bagi Masyarakat untuk memanfaatkan hasil bumi yang melimpah dan sumber daya manusia yang memadai dalam angka membina Masyarakat desa menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah atau sarana masyarakat agar dapat lebih maju baik dari sektor ekonomi maupun sektor pariwisata dan pemberdayaan lingkungan sekitar desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pengelolaan badan usaha milik desa terdapat 4 aspek yang mempengaruhi strategi pengelolaan yaitu aspek perencanaan sudah mengikuti prosedur yang tercantum dalam AD/ART, aspek pengorganisasian menunjuk pengelola yang merupakan unsur masyarakat desa dan tidak memiliki

tugas di pemerintahan desa, aspek pengarahan telah mengawasi kerja anggota serta memonitoring dan aspek pengevaluasian pengelola mengadakan evaluasi tiap 3 bulan, 6 bulan dan pertahun. Kemudian faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan badan usaha milik desa di desa maccini baji yaitu adanya sistem kerja sama hingga dukungan penuh oleh pemerintah desa, pemerataan dan pengadaan dana usaha bumdes.

ABSTRACT

There are various types of programs issued by the government so far to overcome poverty that occurs in the community, not infrequently the community is given adequate facilities to support their efforts in improving mutual welfare. In this case, the government in Pallantikang Village, Pattalassang District, Gowa Regency provides a way for the community to utilize abundant natural resources and adequate human resources in fostering village communities to be better for the future, namely by establishing a Village-Owned Enterprise (BUMDes) as a container or means for the community to be more advanced both from the economic sector and the tourism sector and empowering the environment around the village. his study aims to determine the Management Strategy of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Pallantikang Village, Pattalassang District, Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative, data sources are primary data and secondary data. The results of the study show that the management strategy of village-owned enterprises has 4 aspects that influence the management strategy, namely the planning aspect has followed the procedures stated in the AD/ART, the organizing aspect appoints managers who are elements of the village community and do not have duties in the village government, the direction aspect has supervised the work of members and monitored and the evaluation aspect of managers conducts evaluations every 3 months, 6 months and annually. Then the factors that influence the management of village-owned enterprises in Maccini Baji Village are the existence of a cooperation system to full support by the village government, equalization and procurement of BUMDes business funds.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset dan layanan demi kesejahteraan masyarakat. BUMDes berperan sebagai instrumen penggerak ekonomi desa yang diharapkan mampu mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa melalui pengelolaan yang profesional dan inovatif.

Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengembangkan usaha masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang ada, serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa. Namun, dalam praktiknya tidak semua unit usaha BUMDes berjalan optimal. Salah satu unit usaha simpan pinjam mengalami kendala seperti keterbatasan modal, tingginya risiko, serta keterbatasan tenaga kerja hingga akhirnya mengalami penurunan bahkan kebangkrutan. Di sisi lain, unit serba usaha mampu bertahan dan berkembang meskipun mengalami fluktuasi penjualan. Unit ini menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk layanan harian dan mingguan, sehingga tetap memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi BUMDes terhadap ekonomi masyarakat desa, menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan, serta merumuskan upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait kesejahteraan masyarakat, sementara secara praktis dapat menjadi referensi bagi penulis, masyarakat, dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian.

Peran merupakan seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dimiliki seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, peran tidak hanya berkaitan dengan status, tetapi juga mencerminkan pola interaksi antarindividu dalam suatu organisasi atau kelompok. Peran mencakup tiga komponen utama yaitu konsepsi peran yang berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap tindakan yang harus dilakukan, harapan peran yang berasal dari ekspektasi orang lain terhadap posisi tertentu, serta pelaksanaan peran yang merupakan tindakan nyata individu dalam menjalankan tugasnya. Peran dapat terwujud apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki. Berdasarkan pembagiannya, peran terdiri atas peran aktif yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam aktivitas kelompok, peran partisipatif yang berupa kontribusi terhadap kelompok, serta peran pasif yang memberikan ruang bagi fungsi lain agar berjalan secara optimal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai lembaga komersial yang berorientasi pada keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Pembentukan BUMDes didasarkan pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Pendirian BUMDes berangkat dari prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, dan kapasitas desa, sehingga usaha yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi lokal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan BUMDes harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi, sebagaimana tercermin dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang melarang praktik pengambilan harta secara batil dan menekankan pentingnya transaksi atas dasar suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء/4: 29)

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)

Selain itu, terdapat pula peringatan dalam Q.S Al-Mutaffifin ayat 1–3 tentang larangan kecurangan dalam timbangan dan takaran, yang menjadi landasan etika dalam menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ ۳ (المطففين/83:1-3)

Terjemahan: Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Al-Mutaffifin/83:1-3)

Pengelolaan BUMDes melibatkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dengan sumber permodalan yang dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, maupun kerja sama dengan pihak lain. Secara umum, komposisi modal BUMDes terdiri dari 51% dari desa dan 49% dari masyarakat atau pihak lain. Dalam operasionalnya, BUMDes harus menerapkan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi kegiatan ekonomi desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia, serta menjadi sarana pelaksanaan pembangunan ekonomi desa. Ciri utama BUMDes antara lain dimiliki dan dikelola bersama, berorientasi pada potensi lokal, serta keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pendirian BUMDes meliputi peningkatan perekonomian desa, peningkatan pendapatan asli desa, optimalisasi pengelolaan potensi desa, serta menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi desa.

Peningkatan ekonomi merupakan proses perubahan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, produksi, serta kesejahteraan masyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, serta ketersediaan modal. Indikator peningkatan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik, peningkatan jumlah barang dan jasa, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selain itu, fungsi ekonomi yang dijalankan pemerintah mencakup aspek efisiensi, keadilan, dan stabilitas guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi juga harus bersifat berkelanjutan, meningkatkan pendapatan per kapita, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta memperbaiki sistem kelembagaan di berbagai bidang.

Ekonomi masyarakat atau ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan pemerataan. Sistem ini menuntut partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat menjadi indikator utama kesejahteraan, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti upah, usaha, dan pendapatan tambahan. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah. Prinsip ekonomi kerakyatan meliputi asas kekeluargaan, keadilan, pemerataan pendapatan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kerja sama antar pelaku ekonomi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat belum sepenuhnya optimal. Studi yang dilakukan oleh Yogi Yadi Putra di Desa Tandung menunjukkan bahwa efektivitas BUMDes masih terhambat oleh lemahnya pengelolaan unit usaha, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta minimnya dukungan modal. Meskipun demikian, BUMDes tetap memiliki potensi untuk berkembang apabila dilakukan perbaikan dalam strategi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menekankan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia, serta menjadi media pelaksanaan pembangunan ekonomi desa. Dengan demikian, analisis terhadap peran, kendala, dan solusi dalam pengelolaan BUMDes menjadi penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, serta informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen pendukung seperti foto, video, dan arsip lainnya yang relevan dengan kehidupan individu maupun kelompok masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu desa yang aktif dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan BUMDes. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki aktivitas BUMDes yang cukup berkembang sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak pengelola BUMDes serta masyarakat yang merasakan dampak dari keberadaan BUMDes. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen desa, laporan, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang bersifat tidak terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam dari pihak-pihak yang dianggap kompeten dan relevan dengan permasalahan penelitian. Responden yang diwawancarai meliputi pengelola BUMDes dan masyarakat desa yang terlibat atau merasakan dampak dari kegiatan BUMDes.

Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen penting seperti profil desa, data terkait BUMDes, serta dokumen lain yang mendukung penelitian. Dalam proses pengumpulan data dokumentasi, peneliti menggunakan berbagai alat bantu seperti perekam suara, kamera, buku catatan, dan alat tulis guna memastikan data yang diperoleh dapat terdokumentasi dengan baik dan akurat.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal sebagai informan, yaitu pihak yang memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari pengelola BUMDes dan masyarakat Desa Pallantikang yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait peran, kendala, dan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Pattallassang terletak di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekitar 84,96 km² yang terdiri atas 8 desa/kelurahan, 36 dusun, 82 RW, dan 158 RT. Secara topografis, wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, meskipun terdapat satu wilayah berupa lereng perbukitan yaitu Desa Timbuseng yang sebagian penduduknya tinggal di kawasan bukit Bollangi. Jumlah penduduk Kecamatan Pattallassang pada tahun 2017 mencapai 24.366 jiwa, dengan Desa Pallantikang sebagai desa dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 3.692 jiwa, sementara Desa Borongpala'la memiliki jumlah penduduk terkecil sebanyak 1.735 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan sebagian kecil beragama Kristen dan Katolik, serta berasal dari berbagai suku seperti Makassar, Bugis, Jawa, dan Toraja. Kecamatan ini juga berkembang sebagai kawasan industri, ditandai dengan adanya pembangunan pabrik pengolahan kakao di Desa Panaikang.

Desa Pallantikang sendiri memiliki nilai historis yang kuat, di mana nama desa diambil dari situs batu Pallantikang yang diyakini sebagai tempat pelantikan raja atau penguasa di wilayah Pattallassang pada masa lampau. Situs tersebut berada di antara Dusun Teamate dan Dusun Biringbonto, serta didukung oleh keberadaan peninggalan sejarah lainnya seperti makam Dampang Daeng Ma'Lotteng sebagai raja pertama, Bungung Lompoa (sumur besar), Danau Kalaborang, dan beberapa makam tua yang memiliki nilai sejarah tinggi. Secara administratif, Desa Pallantikang terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Pallantikang, Dusun Datok Bonto, Dusun Nirannuang, dan Dusun Kora-kora. Desa ini juga dikenal memiliki potensi wisata yang cukup berkembang seperti Rumah Hobbit Bollangi, Jungle Camp, dan Air Terjun Ketemu Jodoh, yang menjadi salah satu alasan pemerintah desa mengembangkan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkenalkan desa ke masyarakat luas. Pemerintahan desa saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Suardi, S.Sos dengan Sekretaris Indra dan Bendahara Syaiful untuk periode 2022–2028.

Secara administratif dan demografis, Desa Pallantikang memiliki jumlah penduduk sekitar 4.219 jiwa yang terdiri dari 2.117 laki-laki dan 2.102 perempuan dengan total 1.075 kepala keluarga. Dari sisi sumber daya alam, desa ini memiliki potensi lahan yang cukup luas meliputi sawah sekitar 175,162 hektar, pemukiman 46,42 hektar, tambak 79,72 hektar, perkebunan 11,38 hektar, serta didukung oleh keberadaan sungai seluas 16,27 hektar. Selain itu, desa ini juga memiliki hasil pertanian yang beragam seperti padi, jagung, cabai, bawang merah, tomat, melon, kacang, dan ubi. Pada sektor peternakan, masyarakat mengelola berbagai jenis ternak seperti sapi sekitar 250 ekor, kambing 100 ekor, kerbau 25 ekor, serta unggas seperti ayam kampung, ayam broiler, ayam petelur, dan bebek yang jumlahnya mencapai ribuan ekor.

Dari aspek pembangunan, Desa Pallantikang telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai, antara lain jalan desa sepanjang 4,5 km, jalan pemukiman 4 km, serta tiga unit jembatan. Di bidang pendidikan tersedia fasilitas seperti dua gedung PAUD, dua TK, dua SD, satu MI, enam TPA/TPQ, dan satu PKBM. Pada sektor kesehatan terdapat enam posyandu, satu puskesmas desa, serta sarana air bersih. Meskipun demikian, sarana ekonomi seperti pasar desa dan kios desa masih belum tersedia, namun terdapat 21 kelompok usaha ekonomi produktif dengan 15 di antaranya tergolong aktif dan sehat.

Dalam upaya pembangunan jangka menengah, Desa Pallantikang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pallantikang yang Bermartabat, Agamais, Maju, Aman, Sehat, dan Cerdas.” Visi ini mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam enam tahun ke depan dengan menekankan nilai moral, kemajuan, keamanan, kesehatan, dan kecerdasan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah desa menetapkan misi yang meliputi peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pemerintahan desa, penguatan kegiatan keagamaan untuk menciptakan persatuan, optimalisasi pembangunan infrastruktur guna mendukung pendapatan asli desa, penciptaan masyarakat yang tertib dan harmonis berdasarkan nilai agama dan adat, pemberdayaan sumber daya manusia dan alam, serta peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

A. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Pallantikang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Peran BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat keseluruhan. Pembangunan desa secara mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dan bantuan.

Desa Pallantikang sebagai salah satu desa yang mulai berkembang khususnya di bidang pariwisata. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkuat perekonomian desa Pallantikang membentuk BUMDes Tahun 2012. BUMDes Genthia Persada telah telah membuka usaha-usaha atau mengembangkan usahanya untuk dapat meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat dipedesaan supaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Tidak hanya itu,

Pemerintah desa bersama masyarakat desa setempat juga berupaya meningkatkan perekonomian di sektor pertanian guna meningkatkan pendapatan para petani di desa pallantikang agar kiranya hasil bumi di desa tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan lewat Program pemerintah dan masyarakat ini. Pada tahun 2013 bumdes Pattallassang sudah menguasai dua hektar lahan. Mereka tengah membudidayakan tanaman singkong gajah dan tanaman lainnya.

Dalam beberapa tahun belakangan pemerintah desa dan masyarakat desa pallantikang juga sudah mengembangkan pengolahan hasil pertanian untuk kemudian diolah dalam bentuk jajanan yang banyak di gemari oleh masyarakat terkhususnya anak muda, jajanan tersebut berupa snack yang terbuat dari singkong atau ubi kayu juga talas. Tidak hanya itu pemanfaatan hasil panen lainnya berupa jagung dan kacang tanah juga banyak di manfaatkan masyarakat di desa pallantikang untuk di jadikan jajanan yang banyak di jual di berbagai tempat dan bisa dengan mudah di jumpai. Salah satu contoh jajanan tersebut adalah tentang kacang yang tak jarang di jual di berbagai lokasi wisata yang mana lokasi wisata tersebut juga merupakan tempat wisata yang di kembangkan oleh anggota BUMDes setempat.

B. Tujuan di Bentuknya BumDes Pallantikang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, faktor-faktor pendukung yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku merokok siswa di SMK Negeri 6 Takalar terlihat dari perannya sebagai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pallantikang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2015 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan sumber-sumber penghasilan masyarakat serta memberikan kontribusi ekonomi bagi pemerintah desa. Dengan demikian, BUMDes diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan desa secara berkelanjutan.

C. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes di Desa Pallantikang

Klasifikasi jenis usaha BUMDes di Desa Pallantikang terdiri dari beberapa bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, di antaranya usaha *servicing*, *banking*, *brokering*, *trading*, dan *holding*.

Usaha *servicing* merupakan salah satu jenis usaha BUMDes yang berfokus pada pelayanan publik kepada masyarakat desa, seperti penyediaan air minum, listrik desa, dan lumbung pangan. Melalui usaha ini, BUMDes berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga dengan menyediakan layanan yang mudah diakses dan dikelola secara mandiri oleh desa.

Usaha *banking* adalah kegiatan BUMDes yang bergerak di bidang keuangan dengan memberikan layanan pinjaman atau kredit kepada masyarakat desa. Layanan ini umumnya menawarkan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional, sehingga dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup.

Usaha *brokering* merupakan peran BUMDes sebagai lembaga perantara yang menghubungkan hasil produksi masyarakat, terutama di sektor pertanian, dengan pasar. Dengan adanya peran ini, masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya, sekaligus didukung dengan layanan seperti jasa pembayaran dan pengelolaan pasar desa untuk memperlancar distribusi ekonomi.

Usaha *trading* adalah kegiatan produksi dan perdagangan barang yang dilakukan oleh BUMDes untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Kegiatan ini mencakup pengolahan hasil pertanian maupun penjualan barang yang dapat dipasarkan tidak hanya di tingkat desa tetapi juga ke pasar yang lebih luas.

Usaha *holding* menempatkan BUMDes sebagai induk dari berbagai unit usaha yang ada di desa. Dalam peran ini, BUMDes mengoordinasikan berbagai kegiatan ekonomi seperti desa wisata, usaha kuliner, kerajinan, kesenian, hingga penginapan, sehingga seluruh potensi desa dapat dikelola secara terpadu dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Keberagaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa BUMDes menjadi instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, desa memiliki kewenangan lebih luas untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi secara mandiri. Pembentukan BUMDes merupakan salah satu inovasi strategis yang didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan peluang bagi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi desa harus berbasis pada inisiatif dan partisipasi masyarakat, sehingga lembaga ekonomi seperti BUMDes tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi benar-benar tumbuh dari kebutuhan dan potensi desa yang dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Pallantikang

Hasil observasi dalam pengelolaan terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Permasalahan dalam pelaksanaan BUMDes di antaranya pemberian modal pada masyarakat tidak berjalan sesuai yang diharapkan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban sehingga masyarakat kurang mengerti isi laporan, yang mengakibatkan sering terjadinya kesalahpahaman mengenai pembagian sisa hasil usaha dan alokasi biaya-biaya dari keuntungan BUMDes, serta perekrutan karyawan yang merupakan orang-orang dekat dari perangkat desa dan pengurus BUMDes yang mengakibatkan kecemburuan sosial. Dalam menjalankan badan usaha milik desa ini, tidak jarang dijumpai berbagai permasalahan yang kerap terjadi, mulai dari masalah transparansi pendanaan hingga kesalahpahaman yang melibatkan para pengurus BUMDes dan masyarakat setempat.

Kondisi tersebut sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat, di antaranya mengatakan: “Kadang pembagian hasil usaha kurang transparan sehingga kami yang merupakan masyarakat awam kesulitan untuk memahami apakah pembagian hasil BUMDes sudah merata atau tidak,” ungkap Pak Halim selaku warga yang merupakan anggota badan usaha milik desa (BUMDes). Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat setempat yang lain yang juga merupakan anggota BUMDes di Desa Pallantikang Kabupaten Gowa yang menyebutkan: “Kadang saya kurang mengerti soal pembagian dananya sudah merata atau tidak, tapi yang saya tahu sedikit banyaknya kami juga mendapatkan keuntungan dari program pemerintah ini,” ungkap Pak Jalling yang merupakan warga Desa Pallantikang.

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa beberapa masyarakat masih kurang atau mungkin tidak mengerti dan memahami sistem kerja BUMDes, khususnya dari segi pembagian hasil usaha yang kerap kali masih dipertanyakan oleh masyarakat mengenai berapa persentase yang seharusnya mereka dapatkan ketika mengikuti program pemerintah tersebut. Namun, di sisi lain mereka juga mengakui bahwa adanya program pemerintah berupa badan usaha milik desa (BUMDes) cukup membantu dalam mendapatkan fasilitas sekaligus mempermudah mereka dalam mengelola dan menjual hasil bumi yang berada di Desa Pallantikang.

Tidak hanya itu, masyarakat juga mengungkapkan bahwa BUMDes turut membantu memperkenalkan dan mengembangkan sektor pariwisata di Desa Pallantikang, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan melalui kegiatan berjualan di sekitar tempat wisata. Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang turut merasakan perubahan setelah adanya BUMDes di Desa Pallantikang, di antaranya Pak Maji dan Ibu Hayati. Mereka menyampaikan bahwa keberadaan BUMDes sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan mereka. “Saya selama dibantu oleh pemerintah desa, difasilitasi sehingga bisa membuka lapak jualan di sini merasa sangat terbantu sekali,” ungkap Ibu Hayati. Sementara itu, Pak Maji menyatakan, “Kalau dibilang untung banyak ya tidak, tapi alhamdulillah berkat adanya BUMDes dan saya coba-coba ikut ternyata tidak sulit, walaupun tidak banyak penghasilan yang didapat tapi masih cukup untuk biaya sehari-hari.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa badan usaha milik desa (BUMDes) yang terdapat di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa sejauh ini mampu dan telah membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Meskipun peningkatan tersebut belum signifikan, keberadaan BUMDes mampu memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa, khususnya pengelola BUMDes, perlu meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi serta pengelolaan pendanaan yang masuk dan keluar, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas persentase pembagian keuntungan dari setiap usaha yang dijalankan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat Desa Pallantikang untuk berpartisipasi dalam program BUMDes, sehingga peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan semakin besar.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dirasa telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan permasalahan ekonomi masyarakat Desa Pallantikang melalui program pengolahan hasil bumi dan pengembangan kawasan wisata, walaupun perubahan tersebut dirasa tidak signifikan. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pallantikang ternyata mampu memberikan peningkatan pendapatan dan memperbaiki ekonomi masyarakat desa setempat melalui berbagai program, salah satunya pengenalan lingkungan wisata dan pengolahan hasil bumi sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya badan usaha milik desa (BUMDes) tersebut. Namun demikian, diharapkan adanya transparansi dari pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga permasalahan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pendanaan dan pembagian hasil dari usaha yang dijalankan dapat teratasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang diharapkan dapat mengikuti program pemerintah tersebut.

Diharapkan pengelola BUMDes lebih meningkatkan program yang telah berjalan serta membantu masyarakat dalam memasarkan jasa atau produk, sehingga diharapkan mampu lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Selain itu, pihak pengelola BUMDes diharapkan mampu meningkatkan program usaha yang telah ada sehingga masyarakat Desa Pallantikang dapat lebih meningkatkan inovasi produk atau jasa yang dapat dikelola. Di samping itu, diharapkan adanya transparansi dari setiap dana, persentase pembagian hasil, serta peningkatan dalam proses perekrutan tenaga kerja dari kalangan masyarakat secara luas dan bukan hanya dari keluarga terdekat, sehingga diharapkan tidak ada lagi kecemburuan sosial dan masalah terkait transparansi pendanaan antara pengelola BUMDes dan masyarakat Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

5. REFERENCES

- Apriadi Alvin M. 2023 “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Wanadadi Kabupaten Banjarnegara),” *Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* Vol. 2, No, 2 (Juli-Desember): hl. 94,
- Gunawan Deddy. 2022, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, hl. 13,16, <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/24509/1/Deddy%20Gunawan,%20160604037,%20FEBI,%20IE,%20082165617015.pdf>
- Pariyanti Eka dan Susiani Fitri. 2019, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kabupanten Lampung Timur,” *Ilmiah Keuangan dan Perbankan* Vol. 2, No.1 (November): hl. 3,
- Pradnyani Purnama Sri Luh Ni. 2019, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara,” *Riset Akuntansi* Vol. 9, No. 2 (September), hl. 42,
- Adisarmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta: 162.
- Arikunto, O. S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta: 278.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta: 278.
- Hermawan, W. (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Taggerang Selatan: 13.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: 195.
- Ir.Baqri. (2022). *Kepala BUMDES Assamaturu*.
- Juliandi, A. (2013). *Metode penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Medan: M2000.

- Najib, M. (2018, 7 17). Ini Dia motivasi Hebat Tentang BUMDES. Retrieved from Prokabar: <https://prokabar.com/ini-dia-motivasi-hebat-tentang-tata-kelola-bumdes/>
- Najib, M. (2018, juli Selasa). Prokabar.com. Retrieved from <https://prokabar.com/ini-dia-motivasi-hebat-tentang-tata-kelola-bumdes/>.
- Nanasudjana. (2001). Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makala-Skripsi-Tesis-Disertai. Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Noor, J. (2018). mtodologi Pnelitian Skripsi tesis Desertasi, dan Karya Ilmiah. jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Prasetyo, B. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Republik Indonesia.
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif:Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual. Jakarta: 55.
- Sudarman, A. (2002). Teori Ekonomi Mikro. Yogyakarta: 26.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuntitatif,Kualitatif R&D. Bandung.
- Sugiyono. (2016). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: 261.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta: 85.
- Sujarwe, W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Adawiyah, R. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. Kebijakan Dan Manajemen Publik, (2018)
- Sumarsono, W. Strategi Pendirian dan Pengelolaan BUMDES Amarta dalam penguatan ekonomi masyarakat di Pondowaharjo Sleman Yogyakarta (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2018